

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

A.1. Kronologi Konflik Pemilukada Tana Toraja

Pemilukada Tana toraja berlangsung bersamaan waktunya dengan Pemilukada di beberapa kabupaten di Sulawesi, yaitu pada hari Rabu, 23 Juni 2010. Namun beberapa jam pasca pencoblosan Pemilukada Tana Toraja terjadi peristiwa amuk massa di kota Makale. Peristiwa amuk massa terjadi pada malam hari tanggal 23 dan 24 Juni 2010.

Pada tanggal 23 Juni 2010, pemungutan suara Pemilukada Tana Toraja di TPS mulai Pukul 07.00-13.00. Setelah pemungutan suara ditutup pada pukul 13.00 dilanjutkan dengan penghitungan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dari proses pemungutan suara, perhitungan sura di TPS-TPS hingga kotak suara diangkut ke kantor PPK berlangsung dalam keadaan lancar dan aman.

“Laporan dari teman-teman penyelenggara KPPS, PPS dan PPK menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS hingga seluruh Kotak suara tiba di Kantor PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) berlangsung lancar, aman serta tidak ada keberatan yang cukup berarti dari seluruh pasangan calon.”²²

Sekitar Pukul 14.00 di setiap Posko Tim Pemenangan pasangan calon dilakukan perhitungan cepat hasil perolehan suara berdasarkan informasi yang disampaikan oleh saksi dari setiap TPS. Dengan demikian di setiap Posko berkumpul massa pendukung Pasangan Calon menyaksikan penghitungan cepat tersebut.

²² Agustinus (Anggota KPUD Tana Toraja), *Wawancara oleh Peneliti*, Rantepao: 9 Oktober 2010.

“Ketika saya menerima saran dan informasi yang disampaikan oleh seorang kawan yang berada dikerumunan massa sekitar pukul 17.30 pada hari Rabu, 23 Juni 2010 bahwa massa merencanakan akan bergerak menuju kantor KPU Kab. Tana Toraja, maka pada saat itu pula saya segera meninggalkan kantor dan kembali kerumah di kota Rantepao.”²³

Nampaknya hasil perhitungan cepat di masing-masing posko, memicu emosi ketidakpuasaan massa pendukung yang terkonsentrasi di masing-masing posko Tim pemenangan untuk mengadakan aksi protes atas kemenangan sementara pasangan urut no.5 (TELADAN).

Pada malam hari, sekitar pukul 20.00 Wita, massa pendukung pasangan kandidat Bupati dan Wakil Bupati tertentu mengamuk dan merusak berbagai fasilitas kantor pemerintahan dan Pemilukada Tana Toraja. Massa merusak kantor KPU, kantor Panwas, kantor Camat Makale, Rumah Jabatan (Rujab) Ketua DPRD Tator, dan kantor DPD U Golkar. Dari 19 kecamatan dengan jumlah 401 TPS di Tana Toraja, 12 kecamatan di antaranya surat suaranya hangus dibakar massa (Kecamatan Bittuang, Makale, Mengkendek, Rembon, Salu Kutti, Malimbong, Rantetayo, Gandangbatu Silanan, Simbuang, Sangalla Selatan, Sangalla Utara, dan Makale Utara).^{24 25} Ketua KPU Tana Toraja mengatakan: “Sasaran utama mereka adalah kotak suara, tapi mereka juga membakar dan merusak dokumen penting lainnya.”²⁵

Tabloit KAREBA-edisi 11 Tahun VII-Minggu Pertama Juli 2010; sangat jelas menguraikan tentang kronologi konflik.²⁶ Diuraikan dalam tabloid Kareba

²³ Ibid

²⁴ Louis Ujiane Rongre (Anggota KPU bagian Logistik), *Wawancara oleh Peneliti*, Rantepao: tanggal 23 Nopember 2010.

²⁵ Luther Pongre’kun (Ketua KPU Tana Toraja), *Wawancara oleh Peneliti*, Rantepao: tanggal 24 Nopember 2010.

²⁶Tabloit KAREBA-Edisi 11 Tahun VII-Minggu Pertama Juli, *Pesta yang Berakhir Duka*, 4.

bahwa awalnya ada sekitar 200-an massa laki-laki dan perempuan berjalan menuju kota Makale sambil berteriak-teriak. Makin mendekat ke kota Makale jumlah orang makin bertambah. Rombongan massa yang makin membesar itu, kemudian tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tana Toraja di jalan Tongkonan Ada' Makale. Pada awalnya massa hanya berteriak-teriak menuduh KPU berbuat curang dengan memihak kepada salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati. Aparat kepolisian yang bertugas di gedung KPU mencoba bernegosiasi menghimbau massa agar melakukan demonstrasi pada keesokan harinya dengan mengantongi ijin dari kepolisian. Namun himbauan tersebut, tidak diperdulikan oleh massa; justru mereka terus berteriak dan jumlahnya pun makin bertambah.

Sekitar 15 menit massa berteriak-teriak, kemudian mulai melempari gedung KPUD dan merangsek masuk ke halaman KPUD. Aparat kepolisian mencoba menghalangi, namun karena jumlah massa banyak maka barikade aparat berhasil ditembus. Massa dengan leluasa merusak gedung kantor beserta isi kantor KPUD Tana Toraja.²⁷ Di bagian belakang kantor KPUD massa sempat melakukan pembakaran, tetapi aparat kepolisian dengan sigap memamatkannya. Singkatnya massa meninggalkan kantor KPUD Tana Toraja dalam keadaan rusak parah.

Dari kantor KPUD Tana Toraja, massa kemudian menuju kantor PANWASLUKADA yang berhadapan dengan kantor camat Makale di pusat kota Makale. Dalam perjalanan menuju kantor PANWASLUKADA, jumlah massa makin bertambah. "Estimasi jumlah massa pada malam itu sekitar tujuh ribuan

²⁷ Agustinus (Anggota KPUD Tana Toraja), *Wawancara oleh Peneliti*, Rantepao: 9 Desember 2010.

orang.”²⁸ Sama aksinya di kantor KPUD, di kantor PANWASLUKADA massa juga merusak kantor dan membakar. Isi kantor seperti meja, kursi, lemari, mesin Fax, TV dan berkas-berkas diangkut ke jalanan dan dibakar.²⁹ Kantor camat Makale yang berada tepat di depan kantor PANWASLUKADA pun tidak ketinggalan dari amukan massa yang membringas. Massa merusak pintu dan jendela kantor serta membakar isi kantor di jalan. Kotak dan surat suara Pemilukada yang disimpan di dalam kantor camat pun dibakar oleh massa.

Setelah aksi di kantor PANWASLUKADA dan kantor camat Makale, massa bergerak menuju ke rumah jabatan Bupati Tana Toraja. Namun konsentrasi massa tertahan di kawasan kolam Makale karena gagal menerobos barikade aparat kepolisian. Tak kehabisan akal, massa kemudian mengalihkan sasarannya ke rumah jabatan (Rujab) Ketua DPRD Tana Toraja yang berada dipinggir kolam Makale, tepatnya pada sudut kolam bagian barat. Kaca jendela rumah di hancurkan, isi rumah, seperti sofa dan gorden, diangkut ke jalan dan dibakar.^{30 31}

Selesai melakukan aksi di rujab Ketua DPRD, massa berbalik menuju arah utara kota Makale. Tiba di wilayah Pantan, sekitar 1 KM dari kota Makale, yakni tempat di mana DPD II Partai Golkar berkantor yang sekaligus berfungsi sebagai Sekretariat Tim Pemenangan pasangan TELADAN; massa pun semakin brutal melakukan aksinya. Di kantor DPD II partai Golkar, massa merusak kaca pintu, jendela serta membakar isi kantor.

²⁸Ibid.

²⁹ Dadi Paremisa (Anggota PANWASLUKADA Tana Toraja), *Wawancara oleh Penulis*, Makale: 11 November 2010.

³⁰ Welem Toding (Ketua DPRD Tana Toraja dan Ketua DPD n Partai Golkar Tana Toraja), *Wawancara oleh Penulis*, Makale: 13 Nopember 2010)

³¹ Ibid.

Selesai melakukan aksi di Kantor DPD II Partai Golkar Tana Toraja, massa sempat membubarkan diri selama kurang lebih 30 menit. Namun karena beredar informasi di kota Makale bahwa di beberapa tempat (Rantetayo, Kecamatan Mengkendek, Gansil, rembon, Malimbong, Balepe' dan Sanggalla' berlangsung aksi pembakaran kotak suara dan kertas suara dibarengi dengan beredarnya isu bahwa saat aksi di Rujab Ketua DPRD Tana Toraja ditemukan kotak suara dan kertas suara yang telah tercoblos dengan no urut 5; maka hal ini memancing massa melakukan aksi ke Hotel Batupapan milik pemerintah. Hotel batupapan dikenal juga sebagai posko pemenangan pasangan urut 5. Massa menduga bahwa kemungkinan di hotel ini tersimpan pula kotak suara siluman. Namun selesai mengobrak-abrik Hotel Batupapan, massa tidak menemukan kotak suara dan kertas suara seperti yang dicurigai.

Pada tanggal 24 Juni 2010, pukul 16.30 WIT mulai ada tanda-tanda akan adanya aksi susulan karena konsentrasi massa pada beberapa titik di kota Makale mulai bertambah jumlahnya. Sekitar pukul 18.30 ribuan massa mulai bergerombol menuju kolam Makale; di lengan dan kepala mereka berlilit kain berwarna merah sambil membawa bilah bambu dan kayu-kayu pendek. Massa berencana menduduki Rujab Bupati Tana Toraja. Tetapi gelombang massa hanya sampai di samping gereja yang berdampingan dengan Rujab Ketua DPRD Tana Toraja. Menurut Pdt. Daniel Rori' yang rumahnya berdekatan dengan Rujab Ketua DPRD Tana Toraja, massa begitu banyak dan memadati seluruh wilayah Kolam

Makale.³² Sementara dari arah yang berlawanan, yaitu dari arah kampung Baru Makale dan rujab Bupati Tana Toraja, massa juga bergerombol. Massa dari arah kampung Baru pun sudah siap dengan senjata batu, kayu dan senjata tajam.

Massa dari arah kampung Baru Makale dan dari arah kolam Makale, akhirnya saling berhadap-hadapan. Aparat Brimob dan polisi membuat barikade yang berusaha membatasi kedua kelompok massa. Bunyi mercon yang meledak secara bertubi-tubi di lokasi tersebut, ternyata memanaskan situasi; maka perang batu dan kayu antara kedua kelompok massa pun berlangsung sekitar 2 jam. Dalam suasana dan kondisi yang tidak terkendali, beberapa orang terkena sabetan senjata tajam dan mengalami luka-luka di kepala, mata dan wajah. Perang antar massa ini pun menjadi totonan warga kota Makale. Pada akhirnya aparat kepolisian berhasil memukul mundur kedua kelompok massa.

Di rumah sakit fatimah Makale dan RS Laki Padaa diperoleh informasi tentang korban akibat amuk massa tanggal 24 juni 2010.³³ Ada satu orang yang meninggal dunia, yaitu Palino (28 tahun), warga Se'seng kecamatan Bittuang. Korban sehari-hari bekerja sebagai buruh di proyek pembangunan gedung kampus UKI Toraja yang letaknya persis di lokasi bentrokan massa. Korban meninggal dengan tusukan senjata tajam di bagian dada sebelah kiri. Selain korban meninggal ada juga korban luka-luka; baik luka berat maupun ringan, yaitu: Troni (25 tahun), Bara' (23 tahun), Anda (25 tahun), Irwandy (38 tahun) dan Yohanis (38 tahun). Mereka menderita luka bacok pada bagian punggung. Korban yang dirawat di RS Lakipadada ada empat korban luka-luka, yaitu Aris (20 Tahun),

³² Pdt Daniel Rori' (saksi niata peristiwa langgal 24 Juni 2010), *Wawancara Oleh Peneliti*, Makale: 3 Desember 2010.

³³ Tabloit KAREBA-Edisi 11 Tahun VII-Minggu Pertama Juli, *Pesta yang Berakhir Duka*, 5.

Andang T. (34 tahun), Markus Boro Allo (48 tahun), dan Yunus Sandi (48 tahun).

Pada kerusuhan tanggal 23 Juni 2010, RS Laki Padada merawat korban luka berat pada bagian kepala karena lemparan batu.

Berdasarkan uraian di atas, yang didukung oleh pengamatan dan hasil investigasi langsung oleh peneliti di lapangan; maka ada pun kerusakan bangunan beserta isi dan korban konflik Pemilukada Tana Toraja dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Kantor KPUD Tana Toraja
2. Kantor PANWASLUKADA Tana Toraja
3. Rumah Jaabatan Ketua DPRD Tana Toraja
4. Kantor DPD U Partai Golkar Tana Toraja
5. Hotel Batu Papan Makale
6. Ada 11 kantor camat
7. Ada 1 orang korban meninggal dunia
8. Ada 10 orang korban luka-luka.

Konflik Pemilukada Toraja berlangsung beberapa jam sesudah penghitungan perolehan suara pasangan calon di TPS pada hari Rabu, tanggal 23 Juni 2010 dan berakhir sesudah keputusan MK pada tanggal 19 Agustus 2010.

A.2. Faktor Penyebab Konflik

Sebagaimana berita yang dilansir oleh beberapa media, penyebab terjadinya kerusuhan Pemilukada Tana Toraja diduga karena massa pendukung pasangan tertentu kecewa dan tidak puas atas hasil penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Hal itu, semakin diperkuat dengan hasil *quick count*

sementara dari beberapa lembaga survei yang memenangkan pasangan Theopilus Allorerung-Adelheid Sosang mengalahkan lima pasangan lainnya. Berdasarkan hasil *Real Count Scrip Intermedia* waktu itu, pasangan yang diusung Partai Golkar tersebut unggul sekitar 30%, disusul pasangan Nicodemus Biringkanae-Kendek Rante dengan 24,4%, Victor Datuan Batara - Rosina Palloan 20,78%, Yunus Kadir - Yansen Tangketasik 15,36%, Yohanis Embon Tandipayuk - Ophirtus Sumule 5,72%, dan Cosmos Sampe Birani - Daniel Tonglo 3,67%.

Dugaan yang dikemukakan oleh beberapa media tentang ketidakpuasan atas hasil perhitungan cepat, dibenarkan oleh salah seorang Tim pemenangan pasangan yang kalah. Bahkan menurutnya, ketidakpuasan atas kekalahan merupakan hal yang wajar dan manusiawi.³⁴ Anggota Panwaslukada Tana Toraja juga setuju kalau aksi massa beberapa jam pasca perhitungan di TPS didorong oleh ketidakpuasan atas hasil perhitungan suara sementara.³⁵ Di samping itu, ada dugaan bahwa kericuhan Pemilukada Tana Toraja juga dipicu oleh ketidakpuasan terhadap kinerja aparat penyelenggara dan pengawas pilkada yang dinilai tidak netral.

Malam pertama kerusuhan, *issue* yang ditiup adalah:

1. Kecurangan yang terjadi dalam Pemilukada dan dugaan adanya *Money Politic* oleh pasangan no.5.
2. Perolehan jumlah suara oleh pasangan no. 5 di beberapa kecamatan di nilai “tidak wajar”.

³⁴ Yunus Pakanan, *Wawancara Oleh Peneliti*, Makalc: 10 November 2010.

³⁵ Dadi Paremisa (Anggota PANWASLUKADA Tana Toraja), *Wawancara oleh Penulis*, Makale: 11 November 2010.

3. KPUD dan Panwaslukada Tana Toraja dinilai tidak netral karena banyaknya laporan yang tidak ditindaklanjuti.

Di malam kedua, *issu* beralih kepada Bupati Tana Toraja, bapak J. A Situru' yang dinilai melakukan intimidasi kepada PNS. Dengan demikian dapatlah dipahami bila massa pada malam kedua berusaha untuk menduduki Rujab Bupati dan mendesak Bupati J. A Situru'' untuk mundur.

Pada hari Senin 28 Juni 2010, motif kerusuhan tanggal 23 dan 24 Juli 2010 terungkap melalui selebaran pernyataan sikap yang dikeluarkan Solidaritas Masyarakat Tana Toraja untuk Pemilukada jujur dan adil saat melakukan demonstrasi damai di gedung DPRD Tana Toraja.³⁶ Dalam selebaran demonstran menuduh bupati, KPUD dan PANWASLUKADA tidak netral. Para demonstran melalui pernyataan sikapnya mengungkapkan dugaan ditemukannya tiga kotak suara berisi surat suara yang telah dicoblos dengan nomor pasangan tertentu di Rujab Ketua DPRD Tana Toraja. Para demonstran juga mengungkapkan dugaan temuan tentang penggunaan fasilitas negara seperti mobil dinas, pembagian kompor gas, pengecoran jalan, pembagian pipa, turbin dan kabel oleh pasangan nomor 5 dengan melibatkan aparat lembang dan lurah.

Demonstran juga menuduh ketua KPUD memesan delapan logo KPUD pada percetakan lokal di Makale. Menurut demonstran logo tidak sembarang dicetak, harus sesuai dengan kebutuhan. Bagi demonstran, perbuatan tersebut mengindikasikan adanya upaya KPUD untuk menggelembungkan suara untuk pasangan tertentu. Hal ini, diperkuat dengan adanya tuduhan tentang adanya

³⁶ Data dari PANWASLUKADA Tana Toraja, Wawancara Peneliti, Makale: 11 November 2010.

upaya kerja sama antara bupati, KPUD dan salah satu kandidat tertentu melalui pertemuan antara ketua KPUD dan salah satu anggota DPRD Tana Toraja yang merupakan kakak kandung salah satu kandidat wakil bupati di rumah anggota dewan yang dimaksud.

PANWASLUKADA Tana Toraja di nilai tidak proaktif dalam menanggapi laporan pelanggaran PemiluKada dari masyarakat dan terkesan membiarkan terjadinya kecurangan-kecurangan yang dimaksudkan oleh demonstran. Lembaga ini dituding tidak melakukan tugasnya karena tidak memproses beberapa laporan dari masyarakat.

Dalam prespektif demonstran, serangkaian kecurangan dalam PemiluKada Tana Toraja seperti yang disampaikan dalam pernyataan sikapnya merupakan upaya sistematis dan terstruktur untuk memenangkan pasangan bupati dan wakil bupati yang diusung oleh partai Golkar dan yang mendapat dukungan dari bupati J.A Situru'.³⁷ Semua bentuk tuduhan tersebut di atas, kemudian diajukan oleh pasangan yang kalah ke Mahkamah Konstitusi sebagai bahan dalam meninjau kembali hasil PemiluKada Tana Toraja.

A.3. Usaha Penanganan Konflik PemiluKada Tana Toraja

Dalam rangka mencegah amuk massa yang berkepanjangan, maka pada hari Jumat tanggal 25 Juni 2010 di markas Polres Tana Toraja dilaksanakan pertemuan antara: Kapolda Sulawesi Selatan, Pangdam Wirabuan, KPUD, PANWASLUKADA dan para calon bupati. Calon bupati yang hadir dalam pertemuan tersebut, yaitu: Theofilus Allorerung, Nico Biringkanae, Victor Datuan

³⁷ Pemaparan peneliti tentang pernyataan sikap demonstran merupakan hasil wawancara peneliti dengan teman peneliti yang terlibat sebagai demonstran.

Batara, H.M Yunus Kadir. Sedangkan Yohanis Embon Tandipayuk dan Cosmas Sampe Birana tidak hadir. Melalui pertemuan multi pihak tersebut, Kapolda Irjen Polisi Andang Rochiaya mengingatkan para calon untuk tidak mengerahkan massa dan mengajak untuk mengedepankan proses hukum terkait adanya dugaan-dugaan pelanggaran Pemilukada Tana Toraja.

Menyikapi kondisi politik pasca Pemilukada dan kondisi sosial pasca kerusuhan massa di Makale, maka pada tanggal 28 Juni 2010 , 19 anggota DPRD Tana Toraja melaksanakan sidang paripurna. Rapat paripurna ini, tidak dihadiri oleh 7 anggota DPRD dari Fraksi partai Golkar. Rapat paripurna yang dipimpin oleh Samuel Eban K. Mundi dari Fraksi PDI Perjuangan dan Ester Palloan dari Fraksi demokrat menghasilkan enam rekomendasi yang berintikan antara lain:

1. Berduka atas jatuhnya korban jiwa dan luka-luka kerusuhan.
2. Menyesalkan sikap pemerintah kabupaten Tana Toraja yang tidak memberikan respon dan tidak proaktif menyikapi situasi dan kondisi sosial masyarakat pasca Pemilukada.
3. Mendesak dan meminta pihak-pihak yang berkompeten terhadap Pemilukada untuk menghentikan seluruh tahapan Pemilukada karena sudah terjadi kerusuhan.
4. Mendesak Panwaslukada untuk mengusut tuntas berbagai pelanggaran pemilukada.

³⁸ Data ini peneliti ambil di kantor PANWASLUKADA saat melakukan wawancara tanggal 11 Nopember 2010

5. DPRD menyepakati untuk membentuk Pansus untuk meneliti dan mengusut pelaksanaan Perda APBD 2010 yang diduga kuat disalahgunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu.
6. Menyeruhkan kepada masyarakat untuk menahan diri dan tetap menjaga situasi kondusif.

Peristiwa kerusuhan Pemilu pada Tana Toraja yang menyebabkan 286 kotak suara beserta dengan surat suara dari 12 kecamatan hangus terbakar, menimbulkan suasana tidak kondusif bagi KPUD Tana Toraja untuk melakukan rekapitulasi tahapan yang telah ditetapkan yaitu pada tanggal 24 s/d 27 Juni 2010. Pada tanggal 27 Juni 2010 KPUD Tana Toraja melakukan rapat pleno dan memutuskan untuk menangguhkan jadwal rekapitulasi perhitungan suara di tingkat kecamatan hingga batas waktu yang tidak ditentukan. Pada tanggal 30 Juni 2010 KPUD Tana Toraja mengadakan pertemuan dan meminta petunjuk kepada KPUD Provinsi Sulawesi selatan mengenai tindak lanjut rekapitulasi perhitungan suara. Intinya dalam menyikapi konflik yang terjadi, KPUD Tana Toraja hanya menunggu fatwa dari KPUD Provinsi dan KPU Pusat untuk tindak lanjut hasil Pemilu pada Tana Toraja.

• 39

Laporan dari masyarakat sehubungan dengan dugaan pelanggaran dalam Pemilu pada Tana Toraja yang diterima oleh Panwaslu pada Tana Toraja seluruhnya berjumlah 40 laporan. Empat puluh laporan ini, sebagian besar baru masuk setelah peristiwa kerusuhan terjadi. Menurut Panwaslu hanya 15

³⁹ Agustinus (anggota KPUD Tana Toraja), Wawancara oleh Penulis, Makale 12 Nopember 2010.

laporan yang masuk kategori pidana PemiluKada yang dapat diteruskan ke pihak kepolisian, sebab laporan yang lain tidak cukup bukti.⁴⁰

Adapun penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat KPU Kabupaten Tana Toraja yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Tana Toraja Nomor 261/KPU.TT/VII/2010 tanggal 15 Juli 2010 adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	JUMLAH PEROLEHAN SUARA	%
1	THEOFILUS ALLORERUNG,S.E. ADEHEID SOSANG, S.P., M.H.	37.797	32,69
2	VICTORDATUAN BATARA, S.H. ROSINA PALLOAN, S.E., M.H.	24.946	21,58
3	IR. NICODEMUS BIRINGKANAE DRS. KENDEK RANTE	23.965	20,73
4	H.M. YUNUS KADIR DR.IR. JANSEN TANGKE TASIK, Msi.	18.760	16,23
5	IR. YOHANIS EMBON TANDIPAYUK, M.M. DR.IR. OPHIRTUS SUMULE, DEA	5.316	4,60
6	IR. COSMAS SAMPE B IRAN A, M.S. DANIEL TONGLO, S.E	4.836	4,18
	Jumlah suara sah perolehan suara untuk seluruh pasangan calon	115.620	100

B. PEMBAHASAN

Kerusuhan yang berlangsung pasca pemungutan suara dalam PemiluKada Tana Toraja dari tanggal 23-24 Juni 2010 dapat dikategorikan sebagai konflik, sebab kerusuhan tersebut sangat mengganggu. Dikatakan mengganggu karena

⁴⁰ Dadi Paremisa (Anggota PANWASLUKADA Tana Toraja), *Wawancara oleh Penulis*, Makale: 11 November 2010.

tidak mendukung, memudahkan, membantu kegiatan atau situasi hidup yang sedang berlangsung, melainkan justru merugikan, merusak bahkan sempat melumpuhkan kelanjutan proses perhitungan suara hasil pemilu. Kerusuhan pemilu Tana Toraja merupakan konflik liar yang terbuka dengan menggunakan kekerasan. Menyimak latar belakang peristiwa kerusuhan, maka kerusuhan pasca pemungutan suara Pemilu Tana Toraja tergolong konflik politik, yakni konflik kepentingan meraih kekuasaan.

Memperhatikan hasil penelitian mengenai fakta di lapangan dan data-data yang peneliti peroleh, maka faktor utama yang dominan menjadi penyebab konflik adalah ketidakpuasan atas hasil perhitungan suara di TPS-TPS yang datanya diperoleh dengan metode perhitungan cepat oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil perhitungan cepat itulah yang menjadi titik awal penyebab kerusuhan. Setelah menyaksikan hasil perhitungan cepat, maka pihak-pihak yang tidak puas melakukan aksi protes yang berawal dari turun jalan dan berakhir dengan pengrusakan dan pembakaran bahkan pembunuhan.

Yang menarik dari peristiwa kerusuhan pemilu Tana Toraja adalah bahwa ketidakpuasan atas hasil perhitungan suara sementara, melahirkan usaha untuk menggagalkan hasil Pemilu Tana Toraja tanggal 23 Juni 2010. Aksi pembakaran kotak suara dan kertas suara di 12 kecamatan merupakan tindakan untuk menghilangkan barang bukti yang ada. Ibarat permainan judi, maka dalam konteks konflik Pemilu Tana Toraja berlangsung strategi bermain judi yang curang. Ketika seorang penjudi mengetahui adanya tanda-tanda kekalahan, maka ia akan berusaha menggagalkan kemenangan lawan dengan cara memanipulasi

atau mengacaukan proses judi sehingga permainan diulang. Strategi inilah yang nampak dalam aksi pembakaran kotak dan kertas suara Pemilukada Tana Toraja. Dapat disimpulkan bahwa motif utama pembakaran kotak dan kertas suara adalah pengulangan Pemilukada Tana Toraja.

Adapun data pembakaran kotak suara beserta kertas suara di beberapa kecamatan, sebagai berikut:⁴¹

1. Kecamatan Bittuang yang berjumlah 15 PPS dan 28 kotak suara dengan perolehan suara sah 6.788 suara.
2. Kecamatan Rantetayo yang berjumlah 6 PPS dan 18 kotak suara dengan perolehan suara sah 5.721 suara.
3. Kecamatan Saluputti yang berjumlah 9 PPS dan 13 kotak suara dengan perolehan suara sah 3.996 suara.
4. Kecamatan Mengkendek yang berjumlah 17 PPS dan 48 kotak suara dengan perolehan suara sah 15.276 suara.
5. Kecamatan Rembon yang berjumlah 13 PPS dan 32 kotak suara dengan perolehan suara sah 9.518 suara.
6. Kecamatan Sangala' Selatan yang berjumlah 5 PPS dan 14 kotak suara dengan perolehan suara sah 3.967 suara.
7. Kecamatan Kurra yang berjumlah 6 PPS dan 9 kotak suara dengan perolehan suara sah 2.441 suara.
8. Kecamatan Gandangbatu Silanan yang berjumlah 12 PPS dan 34 kotak suara dengan perolehan suara sah 11.372 suara.

.....
⁴¹ Data yang Peneliti dapat dari Sekretariat K.PUD Tana Toraja, Makale 12 November 2010.

Menelisik lebih jauh terhadap aksi pembakaran kotak dan kertas suara hasil Pemilukada Tana Toraja yang hampir serentak, maka usaha untuk penggagalan hasil Pemilukada Tana Toraja tanggal 23 Juni 2010 terkesan terencana. Hal ini terkesan diamati dari aksi pembakaran kotak dan kertas suara di 10 kecamatan yang waktunya hampir serentak beberapa jam pasca pemilukada. Kemudian fakta di lapangan menunjukkan bahwa pada tanggal 24 dan 25 Juni 2010 masih terjadi aksi pembakaran di Bittuang dan Kurra.

Bahwa pembakaran kotak suara dan kertas suara di 12 (dua belas) kecamatan dipicu oleh kecurangan tidak benar. Sebab masing-masing pasangan calon menghadirkan saksi di TPS-TPS dan tidak ada keberatan mereka saat perhitungan digelar. Atas peristiwa pembakaran kotak suara dan kertas suara di 12 (dua belas) kecamatan terkesan adanya pembiaran dari aparat kepolisian. Hal ini, didasarkan atas fakta bahwa di beberapa kantor kecamatan di tempatkan aparat kepolisian untuk menjaga kotak suara. Namun pada waktu aksi pembakaran berlangsung, aparat kepolisian yang bertugas tidak menindak para pelaku. Kesan akan adanya pembiaran aksi pembakaran kotak suara diperkuat oleh fakta pembakaran 9 kotak suara di kecamatan Kurra oleh seorang yang bernama Tandi Bone. Pada hal, saat itu ada aparat kepolisian yang bertugas menjaga kotak suara.

Pada saat peneliti ke Polres Tana Toraja dalam rangka mencari data, peneliti memperoleh informasi bahwa pelaku pembakaran di Kurra belum tertangkap. Pihak kepolisian belum dapat menetapkan siapa aktor intelektual di balik peristiwa kerusuhan Pemilukada Tana Toraja. Bahkan pelaku pembunuhan pada kerusuhan tanggal 24 Juni 2010 pun belum dapat ditetapkan. Menurut pihak

kepolisian, dari 100 (seratus) saksi yang sudah di periksa semuanya tidak berani menyatakan siapa yang menyuruh dan terkesan sudah diindoktrinasi.⁴² Data ini cukup jelas memperlihatkan bagaimana kinerja aparat kepolisian Tana Toraja dalam menyikapi konflik yang terjadi dalam Pemilukada Tana Toraja. Patut dicatat dalam penelitian ini, bahwa calon Bupati nomor urut 1, yaitu Victor Datuan Batara adalah mantan Kapolres Tana Toraja yang mengundurkan diri pada bulan Pebruari 2010 karena ikut dalam Pemilukada Tana Toraja.

Kasus-kasus yang berhubungan dengan Pemilukada Tana Toraja yang diproses di Pengadilan Negeri Makale Tana Toraja ada 12 (dua belas); yakni 7 (tujuh) kasus *money politics* dan 5 (lima) kasus pencoblosan dua kali.⁴³ Dua belas kasus yang dimaksudkan telah diputus terbukti oleh Pengadilan Negeri Makale. Khusus untuk kasus *money politics*, pihak terdakwa masih menyatakan banding. Jadi belum dapat dikatakan sebagai sebuah keputusan hukum tetap atas sengketa Pemilukada Tana Toraja

Tuduhan ditemukannya kotak suara dalam rumah dinas Ketua DPRD Tana Toraja oleh massa pada tanggal 23 Juni 2010 dibantah oleh bapak Wellem Sambolangi selaku Ketua DPRD Tana Toraja.^{44 45} Berkaitan dengan hal ini, maka salah seorang anggota Satpam di rumah dinas ketua DPRD Tana Toraja yang bertugas saat kerusuhan memberikan keterangan bahwa pada saat massa mendatangi rumah dinas ketua DPRD Tana Toraja dia melihat orang di luar rumah dinas yang membawa satu lembar kertas suara. Tuduhan ditemukannya

⁴² Wawancara oleh penulis dengan Kasad Intel Polres Tana Toraja, Makale, Desember 2010.

⁴³ Kalrina S. Saranga, Wawancara oleh peneliti

⁴⁴ Wellem Sambolangi, Wawancara oleh Peneliti, Makale, 12 November 2010.

⁴⁵ Sapan, Wawancara oleh Peneliti, Makale, 16 November 2010

kotak suara dalam rumah dinas Ketua DPRD Tana Toraja oleh massa pada tanggal 23 Juni 2010 pernah dilaporkan oleh Panwaslukada Kabupaten Tana Toraja kepada Polres Tana Toraja, akan tetapi laporan tersebut tidak cukup bukti untuk diteruskan ke proses penyidikan.

Dengan tidak diteruskannya proses penyidikan tuduhan tersebut di atas, ,mengindikasikan bahwa keterangan dari anggota Satpam di rumah dinas ketua DPRD Tana Toraja mengandung kebenaran. Artinya kertas suara yang diperlihatkan di luar rumah dinas ketua DPRD Tana Toraja berasal dari tempat lain dan besar kemungkinan berasal dari kantor camat Makale. Sebab sebelum massa mendatangi rumah dinas ketua DPRD Tana Toraja, mereka telah melakukan pembakaran kotak dan kertas suara di kantor kecamatan Makale. Dapat disimpulkan bahwa tuduhan tersebut adalah suatu yang tidak berdasar, mengada-ada, dan bersifat fitnah yang sengaja dituangkan di air yang keru oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Sebaba ketua DPRD Tana Toraja adalah ketua Partai Golkar sekaligus ketua Tim Pemenangan pasangan nomor urut 5 yang memenangkan Pemilukada Tana Toraja. Selain itu, tidak ada satu pun KPPS (Kelompok Panitia Pemungutan Suara), PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan PPK (Panitia Pemungutan Kecamatan) yang melaporkan kekurangan atau kehilangan kotak suara kepada pihak-pihak yang berwenang hingga pada hari pencoblosan di TPS. Jadi tidak mungkin ada kotak suara di tempat lain.

Tuduhan tentang penggunaan fasilitas negara seperti mobil dinas, pembagian kompor gas, pengecoran jalan, pembagian pipa, turbin dan kabel; menurut hemat peneliti hanya merupakan asumsi-asumsi yang sifatnya

tendensius. Sebab Adelheid Sosang sebagai calon wakil Bupati yang berpasangan dengan Theofilus Allorerung sebagai calon Bupati merupakan istri J.A. Situru'. Pembagian kompor gas dan tabung gas merupakan program dari pemerintah pusat yang secara kebetulan pendistribusiannya kelembang-lembang atau kelurahan bertepatan dengan berlangsungnya tahapan-tahapan Pemilukada Tana Toraja. Sementara pembagian pipa air minum, pengecoran jalan, turbin dan kabel merupakan proyek Pemkab Tana Toraja dari dana APBD Tana Toraja. Jadi tuduhan-tuduhan yang dimaksudkan harus dibuktikan kebenarannya. Sebab kegiatan-kegiatan yang dimaksudkan dapat saja dipolitisasi. Politisasi yang dimaksud di sini bermakna ganda, yaitu bisa politisasi untuk kepentingan pasangan calon yang menang sebagaimana yang dimaksudkan oleh tuduhan, tetapi bisa juga politisasi pihak yang kalah untuk mendiskreditkan pihak yang menang.